



Ketidakberdayaan Pemerintah India terhadap Isu Privatisasi Air oleh Coca-Cola tahun 1993 - 2004

Dien Nur Rahmaniari Ungsi, Mohamad Rosyidin

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

India is a mixed economic system country where the government can intervene in public affairs. Since experienced a transition period in 1991, India adopted economic liberalization policy and implemented one of the terms of economic liberalization, which is privatization in water sector. This policy led India to hand over a water sector to private companies named Coca-Cola in 1993 and it had a negative impact that is increased water crisis and environmental damage in India. The impact of water privatization by Coca-Cola is a crime that occurs as a consequence of policies that cannot be separated from the effects of adjustments to the global economic system. This research aims to explain the driving factors of the powerlessness of the Indian government in dealing with losses incurred as a result of Coca-Cola's water privatization policy in 1993-2004. The analysis in this study uses a qualitative research method with an explanative research type. This study uses Marxism theory to explain the driving factor of the powerlessness of the Indian government in dealing with the issue of Water Privatization by Coca-Cola. This study found that what prompted the powerlessness of the Indian government was influenced by two factors. First, there is a pressure from changes in domestic economic conditions that make India following global political changes as a solution to the Indian economic crisis. Second, there is a pressure from international economic institutions namely IMF and World Bank which provide loans for India, so that India implementing a structural adjustment program.

Keywords : *Water Privatization, Coca-Cola, Indian Economic Crisis, Marxism, Structural Adjustment Program, IMF and World Bank*

PENDAHULUAN

Coca-Cola memiliki hubungan kerjasama dengan berbagai macam negara salah satunya adalah India. India membuka perkonomian ekonominya terhadap investasi asing sejak tahun 1993 dan pada saat itu juga Coca-Cola memulai kerjasamanya. Dari sudut pandang liberalis, kerjasama yang terjalin antara Coca-Cola dan pemerintah India tampak sangat menguntungkan. Coca-Cola telah menanamkan modalnya sebesar US\$5 miliar untuk India. Coca-Cola mempekerjakan lebih dari 25.000 orang secara langsung sesuai dengan kontrak kerja dimana lebih dari 150.000 orang dipekerjakan sebagai penjual dan distributor (Coca Cola India, 2014). Selain memberikan lapangan pekerjaan, Coca-Cola

mendirikan sekolah dasar dan memberikan perawatan kesehatan bagi masyarakat India yang tidak mampu sehingga mereka mendapatkan pendidikan dan juga pengobatan gratis. Coca-Cola juga menjadi donor utama dalam proses rekonstruksi pembangunan setelah terjadinya Tsunami di India dan mereka memberikan bantuan berupa makanan, pakaian serta obat-obatan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam (CSR Asia, 2005). Jika dilihat dari besarnya investasi yang ditanamkan Coca-Cola untuk India yang meliputi lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan juga bantuan bencana alam, maka Coca-Cola menjadi perusahaan multinasional yang berperan dalam meringankan beban perekonomian negara.

Kerjasama antara kedua belah pihak tidak selalu memberikan keuntungan. Dalam kerjasama antara Coca-Cola dan India juga membawa dampak buruk khususnya dampak yang dialami oleh masyarakat India. Dampak buruk yang dialami oleh masyarakat India yaitu privatisasi air oleh Coca-Cola. Privatisasi air yang dilakukan oleh Coca-Cola menyebabkan kelangkaan air yang terjadi di Plachimada, Kerala. Kelangkaan air itu disebabkan karena perusahaan Coca-Cola mengambil air tanah di daerah tersebut tanpa menggunakan metode *sustainable* (ramah lingkungan) secara jangka panjang. Pengambilan air tanah sebesar 1 juta liter perhari membuat sumur rakyat menjadi kekeringan, maka rakyat mengalami kesulitan untuk mengakses air. Adanya kekeringan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat India, mengingat 80 persen penduduk Kerala bekerja di sektor pertanian sehingga para petani putus asa karena tidak dapat mengairi sawahnya (Achanta & Jelkie, 2011).

Selain kelangkaan air, Coca-Cola juga menyumbang polusi terhadap lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Eksploitasi air tanah yang berlebihan menimbulkan kontaminasi sumur yang mencemari air dengan tingkat Kalsium dan Magnesium yang sangat tinggi dan membahayakan. Air yang pada mulanya jernih kini menjadi berwarna putih susu dan payau namun penduduk terpaksa mengonsumsi air yang terpolusi tersebut untuk kebutuhan minum, mandi dan memasak. Akibatnya, beberapa warga mengalami sakit perut dan lebih dari 100 orang terjangkit penyakit kulit (Winarno, 2014:434). Coca-Cola juga membuang air limbah ke ladang dan juga Sungai Gangga. Di India semua sungai disakralkan termasuk juga Sungai Gangga. Sungai tersebut dipercaya berasal dari surga dan diyakini dapat membersihkan dan menghilangkan cacat material dan spiritual. Setelah Coca-Cola membuang air limbah ke sungai, kualitas air dipenuhi dengan mineral antiseptik (Shiva, 2002:152). Akibatnya, kepercayaan masyarakat India terhadap air sungai menjadi menurun.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat Kerala melakukan protes kepada perusahaan Coca-Cola dengan aksi turun ke jalan pada 24 November 2004. Protes yang awalnya aksi damai kemudian beralih menjadi aksi kekerasan terhadap pengunjung rasa ketika mereka mendekati gerbang pabrik. Protes tersebut menyebabkan pabrik Coca-Cola di Kerala ditutup untuk beberapa waktu. Perusahaan Coca-Cola tidak tinggal diam, dengan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan, pengadilan memutuskan mengizinkan aktivitas Coca-Cola dengan syarat pengambilan air tanah ditentukan oleh pengadilan. Setelah munculnya kesepakatan tersebut, protes masyarakat tetap terjadi secara terus menerus

karena mereka masih merasa bahwa air mereka dirampas oleh Coca-Cola. Perusahaan dan masyarakat masih silang pendapat sampai pada akhirnya di tahun 2011 badan legislatif daerah Kerala menyetujui kebijakan mengenai kompensasi yang harus diberikan kepada perusahaan terkait korban dari dampak negatif eksploitasi air tanah (Winarno, 2014:435).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari privatisasi air yang dilakukan oleh Coca-Cola bagi masyarakat India. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pemerintah India yang kurang efektif dalam menangani isu privatisasi air yang berjalan lebih dari 10 tahun hingga akhirnya masyarakat India melakukan aksi protes kepada Coca-Cola. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori marxisme. Teori ini melihat bahwa terdapat perbedaan kelas antara kaum borjuis dan kaum proletar. Adanya dua golongan yang memiliki perbedaan struktur kekuasaan tersebut memunculkan keberpihakan terhadap pemegang kendali sistem perekonomian yaitu keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional sehingga masyarakat mengalami berbagai macam dampak negatif akibat kebijakan privatisasi air. Dengan demikian, penulis akan menjelaskan faktor yang membuat pemerintah India tidak mampu melindungi hak-hak masyarakatnya atas air. Penulis selanjutnya akan menganalisa sikap pemerintah India melalui sudut pandang teori marxisme.

PEMBAHASAN

Masuknya Coca-Cola ke India

Perusahaan minuman Coca-Cola masuk pada tahun 1993 setelah India membuka perekonomiannya terhadap investasi asing. Coca-Cola menganggap India sebagai salah satu pasar yang paling menjanjikan dan akan berkembang pesat di dunia. Perusahaan ini merupakan salah satu investor terbesar di India dan juga memiliki ambisi yang kuat untuk tumbuh (Ciafone, 2012). Coca-Cola telah menanamkan modalnya sebesar US\$ 2 miliar diantara tahun 1993-2011 (Bhargava, 2013). Selanjutnya di tahun 2013, Coca-Cola mengumumkan akan menginvestasikan modalnya sebesar US\$ 5 miliar hingga tahun 2020 (CocaColaIndia, 2016).

Perkembangan ini juga dapat dilihat bahwa Coca-Cola India memiliki sebanyak 24 pabrik pembotolan dan juga 25 pabrik pembotolan yang dikelola oleh perusahaan *franchises* (Faheem, 2009). Pabrik pembotolan tersebut memiliki lokasi yang strategis di sekitar India untuk mendapatkan sumber daya air maksimum sehingga pabrik dapat memenuhi permintaan produk yang tinggi. Hal ini menuai kontroversi dalam proses pelaksanaan privatisasi air karena pabrik pembotolan dinilai melakukan eksploitasi air yang berlebihan sehingga menyebabkan jumlah air tanah menurun (Srivastava, 2014). Coca-Cola mengelabui masyarakat dengan menggunakan 20 juta liter air tanah untuk memproduksi 5 juta liter minuman Coca-Cola sedangkan 15 juta liter air lainnya dikonversi menjadi air limbah dan dipompakan kembali ke sungai (Thomas, 2008). Maka penurunan kuantitas air tersebut akhirnya menjadi salah satu kerugian yang diberikan Coca-Cola yang mengakibatkan masyarakat mengalami kelangkaan juga pencemaran air.

Pada tahun 1998, Coca-Cola membeli 35 hektar lahan di India bagian Selatan yaitu Plachimada, Kerala melalui persetujuan dewan pemerintah setempat dengan harapan pabrik pembotolan yang akan dibangun dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Namun ketika Kerala mulai menyadari bahwa air sumur di daerah sekitar pabrik pembotolan menjadi kering, mereka melakukan aksi protes kepada Coca-Cola.

Namun Coca-Cola berpendapat bahwa penurunan tingkat air tanah di daerah sekitar pabrik karena kurangnya curah hujan pada dari tahun-tahun sebelumnya (Thomas, 2008)
Kebijakan Privatisasi Air di India

Pemerintah India telah mengadopsi *National Water Policy* (NWP) sejak bulan September, 1987 sebagai dasar kebijakan yang mengatur hak atas air yang mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (NWP, 2002). Namun setelah muncul beberapa kendala dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air maka Kementerian Sumber Daya Air melakukan tinjauan ulang dan memperbarui kebijakannya menjadi *National Water Policy 2002*.

Privatisasi air diatur dalam *National Water Policy 2002* pasal 13 mengenai partisipasi perusahaan swasta bahwa kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Perusahaan swasta juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan bantuan berupa ide-ide inovatif, sebagai wadah yang membantu menghasilkan dana untuk negara dan juga dapat memperkenalkan negara mengenai kinerja perusahaan swasta guna meningkatkan efisiensi layanan dan akuntabilitas. Setelah itu, pemerintah akan mempertimbangkan aktivitas perusahaan swasta secara keseluruhan yang berhubungan dengan privatisasi air seperti dalam upaya membangun, memiliki, mengoperasikan, menyewakan ataupun melakukan proses transfer air melalui fasilitas sumber daya air (NWP, 2002).

Eksplorasi sumber daya air juga harus diatur sedemikian rupa untuk menghindari konsekuensi lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini juga telah diatur dalam *National Water Policy* pasal 7 ayat 2 bahwa eksploitasi air yang berlebihan perlu dicegah secara efektif oleh pemerintah pusat dan perlu adanya pengembangan dan implementasi untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan air (NWP, 2002) sehingga meminimalisir terjadinya kelangkaan atau pun pencemaran air.

Dampak Negatif Proses Pelaksanaan Privatisasi Air oleh Coca-Cola : Meningkatnya Kelangkaan Air di India

Coca-Cola mengundang banyak perhatian negatif masyarakat India khususnya di wilayah Mehdiganj, Uttar Pradesh; Plachimada, Kerala dan Kala Dera, Rajasthan. Ketiga wilayah tersebut mendapat dampak kerugian privatisasi air yang sangat besar. Kerugian ini disebabkan karena perusahaan swasta yang mengambil alih sektor air yang cenderung *profit oriented* yang kemudian mengorbankan kepentingan orang banyak. Kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah melainkan masyarakatnya sendiri. kemudian aspek-aspek dalam kerugian privatisasi air pun juga berkembang kepada permasalahan hak asasi manusia, permasalahan kesehatan dan permasalahan lingkungan.

Situasi di Uttar Pradesh berubah secara signifikan dan mengalami tingkat kritis pada berbagai tempat dalam hal kuantitas juga kualitas air. Hal ini disebabkan karena adanya pabrik pembotolan oleh Coca-Cola (Sinha, 2010). Pabrik pembotolan didirikan pada tahun 1999, kapasitas yang dibutuhkan untuk memproduksi 600 botol berbagai macam jenis minuman Coca-Cola yaitu 500.000 liter air per hari (Drew, 2008). Seiring berjalannya proses produksi pabrik pembotolan, masyarakat mengalami beberapa kesulitan dalam sektor perairan seperti sumur yang kosong, kesulitan mengakses air

untuk mandi, mencuci, memasak, mengirigasi sawah dan menyediakan air untuk hewan ternak. Selain itu, beberapa penduduk Uttar Pradesh yang bekerja untuk Coca-Cola hanya mendapatkan gaji sedikit (sekitar US \$ 1,65 per hari) (Drew, 2008). Setelah itu mereka berupaya untuk melakukan aksi demonstrasi kepada pihak perusahaan.

Penduduk Uttar Pradesh melakukan aksi demonstrasi untuk melawan Coca-Cola sejak tahun 2002 demi mendapatkan kembali hak atas air dan juga air sebagai sumber mata pencaharian (TERI, 2008). Mereka melakukan aksi demonstrasi di luar gerbang pabrik Coca-Cola. Para aktivis ini menuntut pemerintah agar surat izin beroperasi segera dibatalkan dan juga menuntut pihak Coca-Cola agar membayar kompensasi atas kerugian yang didapat para petani dan seluruh penduduk Uttar Pradesh (Hills & Welford, 2005).

Proses untuk menutup pabrik pembotolan ini perlu dua tahun untuk ditetapkan. Pada bulan Juni 2014, Badan Pengendalian Polusi menemukan bahwa Coca-Cola telah melanggar surat izin untuk beroperasi. Anggota dewan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas produksi meningkat dua kali lipat dan juga pabrik menyumbang limbah yang mengandung polutan oleh karena itu dewan memutuskan bahwa Coca-Cola harus mengembalikan air tanah yang semakin menipis (Board, 2014). Namun, dengan sangat tidak terduga di bulan yang sama Coca-Cola dapat kembali beroperasi seperti biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berada dibawah kendali Coca-Cola.

Tekanan Kondisi Ekonomi Domestik terhadap Kebijakan Politik India yang mengikuti Perubahan Politik Global

India menerapkan berbagai sistem perekonomian baru demi menghindari keterpurukan dengan usaha mencapai perekonomian yang lebih stabil. India mulai menerapkan sistem ekonomi campuran dimana pemerintah lebih menyadari pentingnya investasi asing dan kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola perekonomian India. Sebagai negara berkembang, India yang sebelumnya menganut paham negara sentris dimana pemerintah memegang kekuasaan tertinggi akhirnya mengikuti perubahan politik global yang mana secara khusus lebih berkomitmen kepada pasar bebas kapitalisme.

Kondisi ekonomi domestik India menjadi sebuah tekanan negara yang berdampak pada pembuatan kebijakan politik baru dengan mengikuti arus perubahan politik global sebagai jalan keluar bagi keterpurukan ekonomi. Dalam paham marxisme, kelas ekonomi yang dominan akan dominan juga secara politik yang berarti bahwa dalam perekonomian kapitalis akan menjadi kelas yang berkuasa (Jackson & Sorensen, 2009, p. 243). Oleh karena itu, negara-negara berkembang seperti India ikut mempertimbangkan untuk mengambil kebijakan baru demi tidak mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan dan mendapatkan keuntungan negara yang lebih besar karena penyesuaian kebijakan politik India terhadap kondisi politik global (Gilpin, 2011, p. 188).

Pada tahun 1991, pemerintah India mengeluarkan kebijakan ekonomi baru (*New Economic Policies / NEP*) sebagai awal diberlakukannya reformasi pasar. NEP tersebut meliputi kebijakan mengenai liberalisasi, privatisasi dan globalisasi yang bertujuan untuk mengorientasikan sistem ekonomi India terhadap pasar dunia. Kebijakan baru yang lebih terbuka disertai dengan masuknya investasi asing, peran sektor privat yang lebih besar, dan restrukturisasi peran pemerintah (Wardah, 2016, p. 310).

Adanya kebijakan ekonomi baru (NEP) yang dibuat setelah mengalami fase pertumbuhan perekonomian tersebut tidak memiliki perubahan yang signifikan dalam neraca perdagangan India. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan pada tahun 1991-

1994 selama NEP diadopsi hanya merupakan kelanjutan dari tren sebelum dijalankannya NEP (1988-1991) (Deshpande & Sarkar, 2016, pp. 3151-3152).

Secara umum dasar analisis dan bukti empiris seharusnya dapat mendukung restrukturisasi berorientasi pasar yang dapat mendukung produktivitas, kompetitivitas, dan perkembangan lainnya. Namun pada realitanya kebijakan yang baru tidak berbanding lurus dengan proses pelaksanaan yang secara langsung dapat membawa perubahan pada perekonomian negara miskin menjadi negara kaya.

Tekanan dari Lembaga Eksternal

Pelaksanaan privatisasi air berasal dari tekanan organisasi keuangan internasional yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. IMF dan Bank Dunia mendoktrin India untuk melakukan privatisasi sebagai syarat untuk membayar hutang luar negeri dan defisit fiskal. Bank Dunia memiliki peran penting dalam pengimplementasian privatisasi di negara-negara berpendapatan rendah yang bertujuan untuk membantu pembayaran serta mempromosikan budaya privatisasi. Telah ditinjau bahwa sebagai balas budi, negara-negara tersebut diarahkan untuk mengadopsi privatisasi sebagai program penyesuaian struktural.

Tekanan eksternal dari lembaga penyokong tidak bisa diabaikan selama hutang kepada Bank Dunia dan IMF masih tinggi. Dapat dikatakan bahwa semakin besar hutang kepada kedua lembaga tersebut, maka akan semakin besar pula tekanan dari mereka untuk mengimplementasikan program dan ideologi privatisasi. India tidak memiliki pilihan selain mengimplementasikan privatisasi agar pendapatan yang terkumpul dari privatisasi dapat digunakan untuk memberhentikan hutang-hutang negara.

IMF memiliki peran dalam memberikan jaminan bagi negara-negara yang berada dibawah pengaruh Bank Dunia agar menerapkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Bank Dunia seperti privatisasi aset publik, pembukaan pasar bebas, penghapusan pembatasan pertukaran dan lain-lain sebagai bentuk penyesuaian struktural. Secara tidak langsung, bergabungnya IMF dan Bank Dunia dalam memberikan tekanan kepada India bertujuan untuk menguasai negara-negara dunia ketiga (Patnaik & Chandrasekar, 1995, pp. 3002-3004).

IMF dan Bank Dunia menganjurkan program penyesuaian struktural. India menerapkan kebijakan ekonomi baru untuk penyesuaian dan stabilisasi ekonomi termasuk program penyesuaian struktural. Komponen SAP adalah promosi atau pengenalan kebijakan pasar bebas, pengurangan pembatasan impor, peningkatan ekspor, privatisasi industri publik, pelonggaran kontrol negara, pembatasan kredit, kontrol upah, pemotongan ke sektor publik - terutama perawatan kesehatan dan pendidikan. Tujuan program tersebut untuk mengendalikan inflasi dengan cara liberalisasi perdagangan, devaluasi, privatisasi dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri serta ekspor.

Program penyesuaian struktural yang dianjurkan oleh IMF dan Bank Dunia mengalami kesalahan memahami inflasi yang terjadi di India. Akibatnya kebijakan yang diambil pemerintah untuk pengendalian inflasi menjadi tidak efektif dan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti penurunan investasi, kenaikan harga komoditas penting dan defisit fiskal (Deshpande & Sarkar, 2016, p. 3152). Devaluasi yang menjadi saran dari program penyesuaian struktural pun tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi di India.

Peran Amerika Serikat dalam Mendorong Ekspansi Bisnis di India

Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional asal Amerika Serikat sejak 27 Maret 1944 dan termasuk salah satu perusahaan berbasis minuman terbesar di dunia yang mendominasi pasar global. Pada konsep marxisme, Coca-Cola merupakan perusahaan multinasional merepresentasikan bentuk terkini dari eksploitasi kapitalis yang menggunakan otoritasnya sebagai perjuangan kelas internasional oleh negara borjuis untuk mendominasi dan mengeskploitasi ekonomi di negara kelas bawah dan menengah. Perusahaan besar seperti Coca-Cola yang berasal dari sistem kapitalis Amerika Serikat mementingkan perluasan usahanya keluar negeri dan mencari pasar baru sehingga bisa mendapatkan peluang invesatasi yang lebih besar. Kebijakan Amerika Serikat mencerminkan kepentingan ekspansionis dari kelas kapitalis dominan yang ada dengan kepentingan utamanya yaitu menghilangkan hambatan dengan cara memperluas ekspansi dan meningkatkan penghasilan di negara negara yang kurang berkembang.

Perusahaan multinasional melakukan sebagian besar dari kegiatan peningkatan produktivitas Amerika Serikat seperti investasi modal, penelitian dan pengembangan serta perdagangan internasional. Hasil dari kegiatan peningkatan produktivitas tersebut mengarah kepada kompensasi rata-rata yang akan diterima bagi para pekerja Amerika. Amerika Serikat mempekerjakan warga negara mereka dan membuat mereka melakukan aktivitas penting untuk perusahaan multinasional agar perekonomian Amerika Serikat semakin kompetitif dan produktif (Slaughter, 2009, p. 5).

Perusahaan multinasional Amerika Serikat memainkan peran penting dalam perekonomian negaranya. Mereka mempekerjakan jutaan warga negara, menginvestasikan miliaran dalam R&D dan modal, dan membeli dari vendor dan pada akhirnya menghasilkan triliunan dolar dalam barang dan jasa. Kegiatan ini merupakan bagian yang cukup besar dari keseluruhan sektor swasta saat ini, seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade. Hal tersebut merupakan merupakan pilar kekuatan utama bagi perekonomian Amerika Serikat secara keseluruhan.

Perusahaan multinasional disebut mampu menggantikan peran negara dan membawa pertumbuhan perekonomian bagi negara berkembang. Tujuan kerjasama dan adanya investasi dari perusahaan multinasional kepada negara berkembang tentu berorientasi kepada pemaksimalan keuntungan bagi perusahaannya dan sering kali terjadi eksploitasi kepada aset yang dimiliki oleh negara. Adanya regulasi yang dibuat untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari kerjasama seperti contohnya CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan multinasional sebatas untuk memenuhi syarat kerjasama dan memberi citra baik kepada investor.

Perusahaan multinasional sering kali digunakan sebagai alat untuk memberikan pengaruh politik terutama Amerika Serikat kepada negara negara berkembang, motif politik tersebut dilakukan supaya dapat memenuhi keuntungan kompetitif atas industri lokal. Perusahaan multinasional tidak memiliki pemahaman atau kepedulian terhadap kondisi ekonomi domestik sehingga sering kali mengabaikan kondisi tenaga kerja dan persyaratan keamanan nasional. Hal ini sangat dibutuhkan pemahaman terhadap pembuatan kebijakan agar mencegah dan meminimalisir dampak yang akan terjadi dikedepan bagi negara.

KESIMPULAN

Penulis menemukan bahwa alasan yang melatarbelakangi tindakan pemerintah India tidak berdaya dalam menangani kasus privatisasi air yaitu karena India mendapatkan tekanan dari perekonomian global dimana kondisi perekonomian domestik India tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan perubahan perekonomian terpusat

menjadi ekonomi yang berdasarkan pada sistem kapitalis. Ketidakberdayaan pemerintah India dalam menangani kerugian yang terjadi atas privatisasi air oleh Coca-Cola dikarenakan India telah menyetujui kebijakan tersebut untuk syarat pembayaran hutang luar negeri dan defisit fiskal dengan IMF dan Bank Dunia.

Pemerintah India tidak dapat menghentikan kebijakan privatisasi air oleh Coca-Cola secara sepihak karena Coca-Cola juga memberikan lapangan pekerjaan dan bantuan sosial lain kepada masyarakat India. Ketidakberdayaan pemerintah India telah membuktikan bahwa privatisasi air oleh Coca-Cola adalah bentuk konsekuensi yang mencerminkan kepentingan ekspansionis Amerika Serikat untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan lebih. Pada akhirnya pemerintah India mengesampingkan dampak negatif yang merugikan masyarakat India karena kebijakan yang dibuat cenderung lemah untuk membela hak-hak masyarakat atas air dan dampak eksploitasi tersebut terus berjalan sesuai dengan anggapan marxisme.

REFERENSI

- Bhargava, Y. (2013). Coca Cola's 58th bottling plant in India commences operations. (diakses 01 Juli 2018)
- Board, U. P. (2014). Ref. No. 747/Hindustan Coca Cola/14-15. (diakses 01 Juli 2018)
- Ciafone, A. (2012). If Thanda Matlab Coca-Cola Then "Cold Drink Means Toilet Cleaner" Environmentalism of the Dispossessed in Liberalizing India. *International Labor and Working-Class History*, hal. 81.
- CocaColaIndia. (2016). Coca Cola Journey. Retrieved September 14, 2018, from <https://www.coca-colaindia.com/about-us/coca-cola-worldwide-and-in-india/>
- Deshpande, A., & Sarkar, P. (2016). Structural Adjustment in India: A critical Assesment. *JSTOR*. hal 3151.
- Drew, G. (2008). From the groundwater up. Asserting water rights in India. hal 51.
- Faheem, H. (2009). Coca-Cola India's Corporate Social Responsibility Strategy. *Oikos Fondation for Economy and Ecology*, hal 3.
- Gilpin, R. (2011). *The Political Economy of The Multinational Corporation : Three Contrasting Perspectives*. United States: American Political Science Association.
- Hills, J., & Welford, R. (2005). Case study: coca cola and water in India. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, hal 12.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- NWP. (2002). National Water Policy. hal 02.
- Patnaik, P., & Chandrasekar, C. P. (1995). Indian Economy under Structural Adjustment. *JSTOR*, hal 3002-3003.
- Sinha, S. (2010). Groundwater Management in Uttar Pradesh: Present Scenario and Emerging Challenges. Lucknow: Connoisseur.
- Slaughter, M. J. (2009). How U.S Multinational Companies Strengthen the U.S Economy. *United States Council Foundation and Business Roundtable*, hal 5.
- TERI. (2008). "Executive summary of the study on independent third party assessment of Coca-Cola facilities in India. The Energy and Resources Institute.
- Thomas, M. (2008). *Belching Out The Devil Global Adventure with Coca-Cola*. UK: Ebury Press.
- Wardah, A. (2016). Model Non-Ideal Reformasi Pasar India dalam Kontrol Ketidaktercapaian Pasar. *Jurnal Hubungan Internasional Tahun IX*, hal 310.